

**ANALISIS PERILAKU POLITIK MASYARAKAT  
GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung)



**Oleh:**

**RENDY YUSA AMBARA**

**Npm : 1421020210**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2019 M**

**ANALISIS PERILAKU POLITIK MASYARAKAT  
GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam

Ilmu Syari'ah

Oleh:

**RENDY YUSA AMBARA**

**NPM : 1421020210**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.**

**Pembimbing II : Dr. Jayusman., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, negara bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat. Untuk menjalankan pemerintahan khususnya di daerah yang ada di Indonesia maka diperlukannya juga pemimpin daerah yang dapat menyalurkan suara atau aspirasi masyarakat yang ada di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu telah diatur mengenai Pemilihan Gubernur (Pilgub) secara demokratis yang diselenggarakan dalam kurun waktu 5 Tahun sekali. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat tidak peduli dengan adanya pemilu tersebut, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku politik masyarakat golongan putih di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018? bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku politik masyarakat golongan putih di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018?

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dalam metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yang berada di Kelurahan Srengsem dalam kegiatan politik khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor puncak musim panen, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor paslon Gubernur kurang dapat memaksimalkan kampanye di masyarakat, dan faktor non teknis. Faktor tertinggi yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Srengsem tidak hadir dalam pemilihan gubernur lampung adalah faktor paslon Gubernur kurang dapat memaksimalkan kampanye di masyarakat. Menurut analisis Hukum Islam memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Dalam menyikapi perilaku politik masyarakat golongan putih di kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung menurut penulis sudah seharusnya masyarakat tersebut melaksanakan kewajibannya untuk memilih pemimpin mereka dalam hal ini tentu saja calon Gubernur Lampung yang nantinya akan menjadi pemimpin mereka. Sebagai mukmin yang taat tentulah dia kan menunaikan segala kewajibannya hal ini demi terciptanya kemaslahatan sesama umat.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Rendy Yusa Ambara

NPM : 1421020210

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Perilaku Politik Masyarakat Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Persepektif Hukum Islam

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. Susiadi AS, M. Sos. I.**  
**NIP.195808171993031002**

**Pembimbing II**

**Dr. Jayusman, M. Ag.**  
**NIP.197411062000031002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
(Siyasah Syar'iyah)**

**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP.197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : ANALISIS PERILAKU POLITIK MASYARAKAT  
GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2018 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** disusun oleh

**Rendy Yusa Ambara, NPM : 1421020210, Program Studi : Hukum Tata Negara**

**(Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah**

**UIN Raden Intan Lampung, pada hari / tanggal: Kamis, 31 Oktober 2019**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

**Sekretaris : Dr. Agus Hermanto, M.H.I** (.....)

**Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji Pendamping I : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.** (.....)

**Penguji Pendamping II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP.196210221993031002**



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa: 58).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), h. 128.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya hanturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Amri Iskandar dan Ibunda Erni Dahlia yang telah mendidik membesarkanku memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Ridha Allah adalah keridhaanmu.
2. Adik-adikku tersayang, Okta Diana Putri dan Natacia Vara Silva yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangat yang begitu berharga kepada penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rendy Yusa Ambara dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 22 Juni 1996, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah yang bernama Amri Iskandar dan Ibu Erni Dahlia. Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 8 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 13 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “ANALISIS PERILAKU POLITIK MASYARAKAT GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung)” sebagai persyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, dan fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., beserta staff dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Bapak Frenki, M. Si.
4. Pembimbing I Bapak Drs. Susiadi AS, M.Sos. I., yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Pembimbing II Dr. Jayusman, M. Ag., yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Syariah.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah membantu memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Untuk saudari Juwita Permatasari, S.H., yang selalu mendoakan, mendampingi, membantu, serta memotivasi penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku Anton Kurnia M, S.H., Yan Fatmawi S, S.H., Faisal Abdaoe, S.H., Teguh Hermawan, S.H., Sulthan bin Tahir, S.H., Hafid Fajar, S.E., Virgi Ernanda, S.H., yang selama ini telah sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman keluarga besar Siyasah B atas cerita, doa, serta kebersamaannya selama ini dan insyaallah sampai seterusnya.
11. Untuk teman-teman KKN 37 atas kerja sama dan pengalamannya. Serta turut mendoakan dan membantu penulis dengan dukungan moril maupun materil.
12. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Tapi penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan kiranya dapat membantu penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini dan tak lupa penulis juga berharap para pembaca memberi masukan berupa saran sehingga penelitian ini akan lebih baik di masa mendatang.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2019

Penulis,

**Rendy Yusa Ambara**

NPM. 1421020210





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL...</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAR TEORI</b>	
A. Perilaku Politik Golongan Putih	
1. Pengeritian Golongan Putih.....	14
2. Sejarah Golongan Putih .....	15
3. Faktor-Faktor Penyebab Golongan Putih .....	18
4. Macam-Macam Golongan Putih Menurut Tokoh .....	22
B. Golongan putih Dalam Perspektif Hukum Islam	
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Politik Golongan Putih .....	27
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golongan Putih .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN SRENGSEM</b>	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Srengsem .....	44
B. Struktur Organisasi Kelurahan Srengsem .....	46
C. Tugas Dan Fungsi Kelurahan Srengsem .....	46
D. Keadaan Demografi Kelurahan Srengsem .....	47
E. Letak Geografis Kelurahan Srengsem.....	50
F. Bagaimana Perilaku Politik Golongan Putih Warga Kelurahan Srengsem Serta Apa Saja Yang Menjadi Alasan Mereka Melakukan Golput.....	52

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perilaku Politik Masyarakat Golput Kelurahan Srengsem..... 61
- B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Golput Kelurahan Srengsem..... 64

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran ..... 69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Tabel Daftar Nama Lurah di Kelurahan Srengsem .....	45
2. Data Tabel Daftar Struktur Kelurahan srengsem .....	46
3. Data Tabel Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Srengsem .....	48
4. Data Tabel Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Srengsem .....	48
5. Data Tabel Agama Yang di Anut Masyarakat Kelurahan Srengsem.	49
6. Data Tabel Etnis Masyarakat Kelurahan Srengsem .....	50
7. Data Tabel Luas Wilayah Menurut Kegunaan Kelurahan Srengsem	51
8. Data Tabel Hasil Pemilihan Gubernur Kelurahan Srengsem.....	54
9. Data Tabel Nama Informan Kelurahan Srengsem .....	55
10. Data Tabel Daftar Rasio Usia Informan Kelurahan Srengsem .....	56
11. Data Tabel Pekerjaan Informan Kelurahan Srengsem .....	57
12. Data Tabel Asal Informan Kelurahan Srengsem .....	58
13. Data Tabel Alasan Informan Tidak Memilih .....	59



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari perbedaan persepsi dalam penulisan skripsi ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan pengertian istilah-istilah yang dimaksudkan dalam judul ini, adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,dll) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkarayanya, dsb).<sup>2</sup> Dalam pengertian lain penguraian suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu cara untuk mengkaji secara lebih dalam suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat pula.
2. Perilaku politik atau *political behavior* adalah merupakan sebuah keniscayaan dalam berpolitik. Karena seseorang yang berpolitik adalah mereka yang harus bertindak berdasarkan nilai dan gagasan konseptual dalam politik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

<sup>3</sup> Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 134.

3. Masyarakat adalah sebuah kesatuan dari mekanisme-mekanisme independen yang memastikan integrasi yang saling tergantung atau kombinasi yang saling tergantung lainnya.<sup>4</sup>
4. Golongan putih adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau sering pula didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya, golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.<sup>5</sup>
5. Pemilihan Gubernur Lampung adalah pemilihan kepala daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.<sup>6</sup>
6. Hukum Islam adalah hukum yang berpijak pada *kitabullah* dan *kitabulhadiis* sebagai sumber utama ijtihad pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau penyempurna sumber utama.<sup>7</sup>
7. Kelurahan Srengsem adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat

---

<sup>4</sup> Lucia Ratih, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, Juli 2010, h. 64.

<sup>5</sup> Badri Khaeruman, *Islam dan Demokrasi Mengungkapkan Fenomena Golput* (Jakarta : PT Nimas Multima, 2004), h. 69.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung : University Lampung, 2008), h. 7.

Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>8</sup>

8. Kecamatan Panjang adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.<sup>9</sup>
9. Kota Bandar Lampung adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Walikota atau bisa disebut dengan Kotamadya. Kota Bandar Lampung adalah kota dipimpin oleh Herman HN, yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

Jadi dengan demikian, maksud dari judul ini adalah sebuah upaya mengetahui lebih dalam tentang perilaku politik masyarakat golongan putih di Kelurahan Srengrem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung kemudian dianalisis menurut perspektif Hukum Islam.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Alasan objektif  
Banyaknya perilaku politik masyarakat golongan putih yang ada di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Pada pemilihan Gubernur Lampung 2018 lalu.
2. Alasan subjektif
  - a. Penelitian ini belum dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Kelurahan.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang saat ini sedang ditempuh peneliti yaitu Siyasah.

### C. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Konsep demokrasi secara umum merupakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.<sup>10</sup> Sistem demokrasi dianggap paling ideal untuk diterapkan di negara modern.<sup>11</sup> Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan arah dan tujuan negara.<sup>12</sup> Karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, negara bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat.

Untuk menjalankan pemerintahan khususnya di daerah yang ada di Indonesia maka diperlukannya juga pemimpin daerah yang dapat menyalurkan suara atau aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Oleh sebab itu maka dibentuklah pemimpin daerah yang diantaranya adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, walikota dan wakil walikota untuk kota, dan bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu telah diatur mengenai Pemilihan Gubernur (Pilgub) secara demokratis yang diselenggarakan dalam kurun waktu 5 Tahun sekali. Artinya setiap warga atau masyarakat suatu daerah dapat memilih

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 105.

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 241.

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan* (Jakarta : PT Gramedia, 1980), h. 32.

pemimpinnya melalui Pemilihan Gubernur (Pilgub) tersebut serta bebas untuk memilih siapa calon pemimpin yang dikehendakinya.

Namun pada kenyataannya banyak masyarakat tidak peduli dengan adanya pemilu tersebut, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Peningkatan golput dalam pemilu tentu menjadi beban bagi semua pihak khususnya bagi para pejabat dan politisi di negeri ini baik itu baik itu beban politisi maupun psikologis. Kendati jumlahnya melampaui pemenang, golput tidaklah membatalkan hasil pemilu, tapi secara substantif, tingginya angka dan bahkan golput menunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap pemilu dan pemenang.<sup>13</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa legitimasi dalam perspektif demokrasi adalah tingkat partisipasi sebagai bentuk keterlibatan menentukan arah pengambilan keputusan. Legitimasi merupakan kunci penentu yang secara fungsional kontribusi sebagai faktor pendukung kekuasaan sebagai output demokrasi itu sendiri. Jika tidak, maka keberadaan demokrasi itu sendiri akan sama dengan ketidak beradaannya. Hingga kini sistem demokrasi dalam konteks pemilu sebagai sendi penyelenggara negara belum mampu melakukan antisipasi preventif mencegah golput, bahkan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang mendasari pelaksanaan pemilu justru mendistorsi spirit untuk mencegah golput.

Memilih dalam pemilu termasuk dalam hal ini Pemilihan Gubernur (Pilgub) adalah hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang telah

---

<sup>13</sup> Jolo J Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 210-211.

memiliki KTP. Namun bagi mereka yang memutuskan untuk tidak memilih apapun alasannya alias menjadi golput, sebenarnya tidak menyalahi aturan perundang-undangan apapun, sehingga tidak dapat dipidana.

Meskipun begitu, Pasal 308 UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjerat orang siapapun yang mengajak orang lain untuk golput.

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>14</sup>*

Pasal tersebut menunjukkan bahwa jika ada seseorang yang menghalangi siapapun untuk memilih, orang tersebut dapat dikenakan sanksi. Tetapi jika seseorang memutuskan untuk golput karena pilihannya sendiri, yang bersangkutan tidak melanggar aturan hukum apapun.

Pada pemilihan gubernur provinsi Lampung tahun 2018 jumlah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan berjumlah yang ada di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung berjumlah 5.063. jumlah itu terdiri dari 4.870 pemilih tetap dan 193 pemilih tambahan. Dari data tersebut jumlah perolehan suara yaitu 3.369 yang terdiri dari 3.317 surat suara yang sah sementara 52 surat suara dinyatakan tidak sah. Dari hasil data tersebut dapat diketahui jumlah orang yang tidak memilih atau melakukan

---

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 308 Undang-Undang Tentang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.



Golput yaitu sebanyak kurang lebih 1.501 atau sebanyak 25,84 %.<sup>15</sup> Dari apa yang dihasilkan dalam pemilu juga melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan tersebut disuarakan untuk banyak pihak, kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemimpin. Hal tersebut juga dapat dilatarbelakangi oleh pengaruh tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat terhadap kesadaran dalam partisipasi politik.<sup>16</sup>

Bersandar pada penjelasan sebelumnya, bahwa tindakan golput merupakan tindakan tercela, merusak tatanan aturan yang telah disahkan oleh undang-undang. Tindakan seperti ini tidak dibenarkan dan keluar dari koridor ketentuan.

Menyikapi hal tersebut, dalam sudut pandang Islam bahwa tindakan golput bagian dari pelanggaran. Selaras dengan sikap tidak patuh terhadap perintah Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari

<sup>15</sup> Data hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

<sup>16</sup> Samuel P Huntington Dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 76.

*kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun wajib hukumnya, karena jika pemimpin tidak ada maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan.

Menurut Keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Januari 2009/29 Muharram 1430 H, mengenai golongan putih (golput) hukumnya haram.

Islam menilai bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekedar hak, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Maka mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga.

Persoalan perilaku golput di Kelurahan Srengsem masih terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu penulis, mengambil penelitian dengan judul “ANALISIS PERILAKU POLITIK MASYARAKAT GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung)”

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), h. 128.

#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku politik masyarakat golongan putih di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku politik masyarakat golongan putih di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penulisan untuk mengadakan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku politik masyarakat golput Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018.
  - b. Untuk memberikan penjelasan mengenai analisis hukum Islam terhadap perilaku politik masyarakat golput di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Dari aspek teoritis

Supaya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk bisa lebih mensosialisaikan pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat tidak golput.

### b. Dari aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pendorong perkembangan pemikiran ilmiah dan sebaga pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari

---

<sup>18</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung), h. 21.

subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>19</sup> Penelitian ini menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) terhadap masyarakat Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang menjadi objek penelitian lapangan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang akan berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perilaku Politik Masyarakat Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Gubernur.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama, yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban informan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer, yang bersumber dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah, hasil karya ilmiah, Al-Qur'an dan Hadist Jurnal dari catatan atau laporan historis.<sup>20</sup> Dan

---

<sup>19</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian* ( Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21.

<sup>20</sup> Zeni Yusardi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 6.

hasil pembukuan dokumen itu berupa dokumen-dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data lapangan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informandicatat atau direkam.<sup>21</sup> Yaitu penulis melakukan wawancara terhadap sejumlah masyarakat di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bamdar Lampung.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>22</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yang berlokasi di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

### 4. Metode Pengolahan data

Setelah sumber mengenai data yang sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang di proses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi lapangan dilakukan melalui tahap observasi, wawancara, dan penelaahan data. Data yang sudah dikumpul kemudian di olah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*),

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.97.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 106.



penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>23</sup> Analisa deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.<sup>24</sup> Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>23</sup> Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

<sup>24</sup> Surharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "suatu pendekatan praktik"* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), h. 282.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perilaku Politik Golongan Putih

##### 1. Pengertian Golongan Putih

Mengawali pemahaman kita terhadap pemilihan umum (pemilu), terlebih dahulu kita perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.<sup>25</sup>

Golongan Putih atau yang disingkat golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.<sup>26</sup>

Orang-orang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang merupakan sebuah *tindakan politik* atau

---

<sup>25</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 45.

<sup>26</sup> Badri Khaeruman dkk., *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput* (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004) h. 69.

*perilaku politik* itu, dalam *paradigma mekanistik* komunikasi politik tentu merupakan efek yang sangat negatif. Hal itu dapat disebut sebagai kegagalan komunikasi politik oleh para komunikator politik, karena para politikus atau komunikator politik tidak berhasil menciptakan *efektivitas* dalam kampanye atau pemasaran politik yang dilakukan.<sup>27</sup>

Di samping itu orang-orang yang sengaja tidak berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilu yang dikenal sebagai golput itu, menunjukkan bahwa agenda politik pemilu tidak mampu “menembus” *filter konseptual* atau kesadaran akan sejumlah yang menjadi khayak komunikasi politik yang bernama, golput yang merupakan *respons* terhadap *stimulus* politik yang menyentuknya. Sedang dalam *paradigma pragmatis*, golput setiap pemilu itu merupakan sebuah tindakan politik atau perilaku politik yang telah membentuk satu pola. Justru itu golput dapat *diprediksi* dalam menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang.<sup>28</sup>

## 2. Sejarah Golongan Putih

Istilah Golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama pada zaman Orde Baru tahun 1971. Pemerakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan Imam Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan dan cenderung diinjak-injak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 92.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 93.

<sup>29</sup> Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 104.

Dan istilah ini diproklamirkan di Gedung Balai Budaya Jakarta, ketika itu diperkirakan sebulan lagi akan dilaksanakan Pemilu tahun 1971. Arief Budiman yang didampingi oleh mahasiswa serta Tokoh pemuda lainnya memproklamirkan gerakan moral yang mereka namakan dengan *Golongan Putih* atau (Golput). Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sistem yang ada saat itu. Eksponen Golongan Putih sebanyak 34 orang ditahan.<sup>30</sup>

Pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan yang merupakan persyaratan bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk tidak mengunjungi masing-masing Tempat Pemilihan Umum (TPS). Mereka menamakan dirinya Golongan putih.<sup>31</sup> Golongan putih atau golput istilah ini di Indonesia berawal dari gerakan protes mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru, Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit dari pada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik.

---

<sup>30</sup> Priambudi Sulistiyanto, *Politik Golput di Indonesia Kasus Peristiwa Yogya*, h. 2.

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 479.

Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah *Golput* ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah *putih* karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara diluar gambar parpol peserta pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi Golongan Karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.<sup>32</sup>

Gerakan moral ini memberikan kesan kepada publik bahwa putih dibandingkan dengan lawannya, yakni hitam, kotor. Menurut Varma terjadinya Golput di negara berkembang seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme. Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokrasi.

Kemudian istilah golput itu berkembang mencakup semua suara yang rusak dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam pemilu baik karena sikap politik memprotes, maupun karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau karena alasan lainnya. Salah satu alasan orang tidak datang ke bilik suara ialah karena tidak mengenal satu pun

---

<sup>32</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 6 (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), h. 197.

kandidat atau calon yang dipilih. Hal itu menunjukkan adanya kegagalan komunikasi politik oleh para politikus atau partai politik sebagai komunikator politik.<sup>33</sup>

### 3. Faktor Penyebab Golongan Putih

Ketidak ikutsertaan masyarakat dalam urusan-urusan politik, termasuk dalam pemberian suara pada saat pemilihan umum disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

#### a. Masyarakat yang putus asa dengan keadaan yang tidak berubah

Pada saat kampanye berlangsung calon dari parpol tertentu seringkali mengumbar janji-janji serta visi misi yang membuat masyarakat memilih calon tersebut. Tapi hal ini tidak sejalan dengan apa yang terealisasi dalam sistem pemerintahan yang terjadi. Kondisi ini lah yang membuat jumlah suara golput akan pemilu semakin tinggi.

Karena faktor individu seseorang yang dahulunya pernah menaruh janji kepada masyarakat tersebut akan mewujudkan apa yang di impikan, tapi hal itu tidak terlaksana dan tidak ada perubahan yang detail. Ketidak ada perubahan inilah yang membuat masyarakat kecewa dan berfikir bahwa tidak ada perubahan apabila dia menggunakan hak suaranya pada pemilihan.

Mungkin jika alasannya karena kecewa terhadap pemerintahan yang ada akan menjadi persoalan tersendiri, sebaiknya para calon dalam berkampanye tidak hanya menyerukan tentang visi misi yang dibawa,

---

<sup>33</sup> Anwar Arifin, *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 92.



tetapi harus memberikan jaminan bagaimana jika program yang disampaikan dalam kampanye tidak berjalan.

Agar jumlah suara golput berkurang pentingnya dilakukan pemahaman tentang pentingnya pemilu menjadi pekerjaan rumah bersama, sebaiknya pemerintah sebagai pihak penyelenggara dari pemilihan menggandeng semua elemen masyarakat untuk mensosialisasikan hal tersebut karena demokrasi adalah “dari, oleh dan untuk rakyat”. Serta pemahaman mengapa visi misi itu tidak terlaksana agar tidak ada yang merasa di rugikan.

b. Masyarakat yang sudah putus asa dan kecewa pada pemerintah

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya menggambarkan rendahnya kesadaran politik. Keputusan untuk golput juga dipicu kekecewaan mereka terhadap partai politik dan pemerintah. Golput menjadi bukti bahwa masyarakat mulai putus asa dan kehilangan harapan.

Dalam hal ini masyarakat merasa dikhianati oleh wakil dan pemimpin yang dipilihnya. Kondisi ini diperparah oleh tingkat pejabat publik yang tidak memenuhi amanah, tidak sedikit pejabat publik yang terbukti korupsi. Bahkan pejabat pemerintahan baik di pusat maupun daerah juga melakukan hal yang sama serta pemerintahan berharap kondisi politik dan ekonomi membaik akan tetapi semakin terpuruk. Hal inilah yang menyebabkan keputusan masyarakat.

c. Masyarakat yang apatis terhadap pemerintah

Apatisme masyarakat dalam politik seringkali diartikan dalam tindakan personal dimasyarakat untuk tidak ikut serta dalam agenda politik, para ahli pun seringkali memberikan indikator apatisme dari hanya ke ikutsertaan masyarakat pada sebuah agenda politik.

Apatis adalah sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap orang lain, keadaan, serta gejala-gejala sosial politik lainnya. Para pemilih yang dianggap apatis tersebut tetap datang ketempat pemungutan suara dan memilih, apatisme masyarakat seringkali disalah artikan sebagai golongan putih (golput) yang berarti sekelompok masyarakat yang menolak untuk memilih. Alasan mengapa seseorang menjadi apatis adalah karena ekonomi, karena tidak tahu, dan karena malas.

d. Masyarakat tidak mendapatkan figur yang cocok untuk dipilih dan menjadi harapan.

Sering terdengar tidak adanya figur yang cocok untuk dipilih menjadi satu alasan yang rasional seseorang memilih untuk tidak memilih siapapun dalam pemilihan umum (pemilu). Apabila kita hanya fokus pada kejelekan seseorang maka yang tampak adalah kejelekannya saja dan jumlah angka golput pun akan bertambah.

Maka dari itu kita harus cerdas dalam berfikir, kemungkinan kejelekan calon tersebut sengaja dihembuskan oleh lawan-lawan pilihnya. Akan lebih baik kita mencari referensi tentang orang-orang

tersebut agar tidak salah memilih dan tidak menemukan figur yang cocok bukan berarti kita tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu.

e. Menganggap golput sebagai sikap memprotes pemerintah

Ada atau tidak ada suara golput, tetap akan ada pemenang dan pemerintahan akan tetap berjalan, dan sikap protes ini sama sekali tidak ada pengaruh apapun kecuali, bagi orang yang sengaja melahirkan atau menciptakan mindset karena alasan-alasan pribadi. Jadi alasan seperti ini hanya kekecewaan individu terhadap pemerintah.

f. Adanya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan bersifat penting

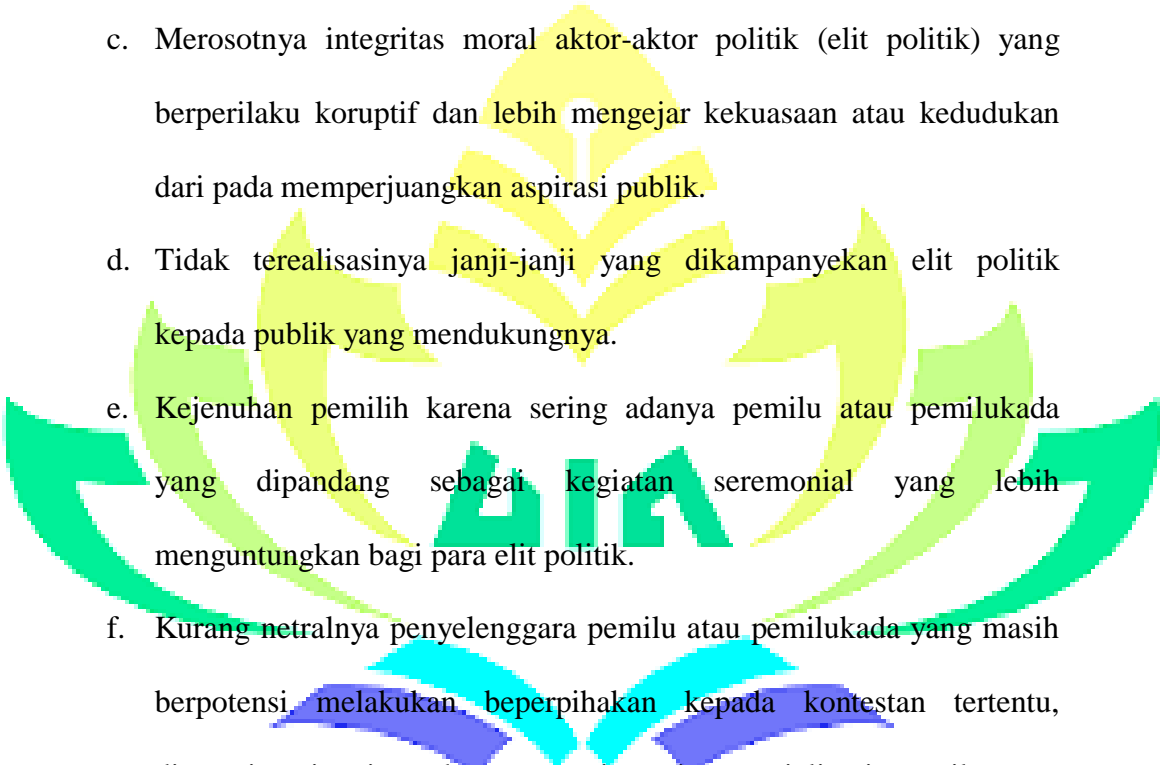
Setiap hari kita disibukkan dengan berbagai kegiatan atau rutinitas yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan kesibukan ini jugalah menjadi alasan yang mendasar seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Apabila ditinjau lebih dalam kesibukan tersebut hanyalah satu alasan mengapa seseorang untuk tidak memilih (golput). Pada dasarnya pemilu bukan lah suatu perintah yang “wajib” atau hakiki untuk diikuti, tapi ikut berpartisipasi dalam politik pemerintahan yang akan menentukan nasib suatu bangsa.<sup>34</sup>

Bahwa secara empirik peningkatan angka Golput tersebut terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut:

a. Pemilu belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Parded Bonet “Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu”, (On-line), Tersedia di: [https://www.academia.edu/12478365/PENYEBAB\\_MASYARAKAT\\_TIDAK\\_MEMILIH\\_DALAM\\_PEMILU](https://www.academia.edu/12478365/PENYEBAB_MASYARAKAT_TIDAK_MEMILIH_DALAM_PEMILU), akses tanggal 1 Mei 2019.

- 
- b. Menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki *platform* politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya.
  - c. Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan atau kedudukan dari pada memperjuangkan aspirasi publik.
  - d. Tidak terealisasinya janji-janji yang dikampanyekan elit politik kepada publik yang mendukungnya.
  - e. Kejenuhan pemilih karena sering adanya pemilu atau pilukada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial yang lebih menguntungkan bagi para elit politik.
  - f. Kurang netralnya penyelenggara pemilu atau pilukada yang masih berpotensi melakukan bepihak kepada kontestan tertentu, disamping itu juga kurangnya intensitas sosialisasi pemilu atau pilukada secara terprogram dan meluas.<sup>35</sup>

#### **4. Macam-Macam Golongan Putih Menurut Para Tokoh**

Golput disebut juga dengan abstain pada even pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Menurut B.M Wibowo, golput ialah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta pemilu. Selanjutnya, ia juga

---

<sup>35</sup> Varma S.P. *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 295.

berpendapat, golput adalah sebutan bagi orang atau kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.

Menurut Susan Weich, ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu juga sebaliknya.<sup>36</sup>

Dalam buku *Political Explore*, Indra J. Piliang menyatakan bahwa Golongan Putih atau Golput dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon Presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian Golput. Dia membagi Golput menjadi 3 bagian yaitu:

a. Golput Ideologis

yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan *anti-state*, ketika *state* dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat.

Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah pemilih tanda gambar sehingga rakyat

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.

b. Golput Pragmatis

Yakni golput berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.

c. Golput Politis

Yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih Golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.<sup>37</sup>

Menurut Mufti Mubarak, “bagi masyarakat, sikap Golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat, Golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah”.<sup>38</sup>

Menurut Eef Saefulloh Fatah, juga telah merangkum sebab-sebab orang untuk Golput, diantaranya adalah:

a. Golput Teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya

---

<sup>37</sup> Efriza, *Political Explore* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 545.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 541.



dinyatakan tidak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu.

- b. Golput Politis, hal ini untuk masyarakat yang tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu atau pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
- c. Golput Ideologis, hal ini untuk masyarakat yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok Golput:

- a. Kelompok golput awam.

Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai deskriptif saja.

- b. Kelompok golput pilihan.

Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka menghendaki pemilu atas dasar sistem

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 546.

distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awan.

Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak hanya berada pada tingkat deskripsi saja, tetapi juga pada tingkat evaluasi.<sup>40</sup>

Menurut Badri Khairuman mengungkapkan tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidakikutsertaan masyarakat dalam urusan-urusan politik, termasuk dalam pemberian suara saat pemilihan umum disebabkan oleh tiga faktor :

- a. Apatisme (masa bodoh), sikap ini lebih sekedar manipulasi kepribadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap politik.
- b. Anomi (terpisah), sikap ini merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama kepada keputusan yang dapat diantisipasi. Ia masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna, akan tetapi ia merasa tidak dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Singkat kata anomie adalah sikap, hal ini menjadi ekstern dan meluas akan mencakup sesuatu perasaan ketidakberdayakan dalam mengendalikan hidup secara umum.

---

<sup>40</sup> Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 22.

c. Alienasi (terasing), sikap ini berbeda dari apatis dan anomi. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Individu yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan tetapi ia juga dapat mengambil alternatif untuk menggulingkan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, atau dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan hijrah.<sup>41</sup>

Perilaku golput juga merupakan refleksi budaya politik individu-individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sikap seseorang untuk berpartisipasi apakah aktif, pasif atau kritis dalam pemilihan umum tidak terlepas dari budaya politiknya. Dengan demikian kapabilitas dan daya tanggap seseorang atau kelompok terhadap suatu sistem politik ditunjukkan atau dicerminkan oleh budaya politik yang dianut.<sup>42</sup>

## **B. Golongan Putih Dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Politik Golongan Putih**

Ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw tidak menjelaskan secara shahih tentang golput. Namun kepemimpinan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam al-Qur'an diungkapkan dalam beberapa istilah yang berbeda-beda. Terkadang al-Qur'an mengungkapkan kata pemimpin

---

<sup>41</sup> Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkapkan Penomena Golput*, h. 87-88.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 94.

dengan khalifah, atau dengan wali, dan pada ayat lain diungkapkan dengan kata ulil amr.

Dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Q.S. An-Nisa: 58).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah:30).

Quraisy Shihab dalam tafsirnya al-misbah menjelaskan kata khilafah dalam ayat 30 surat al-Baqarah, pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah dalam arti yang

menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak mampu atau menjadikan manusia sekedudukan dengan tuhan. Allah hanya bermaksud menguji manusia dan memberikan penghormatan kepada mereka. Kekhalifahan tersebut diserahkan kepada adam dan cucu-cucunya yaitu seluruh manusia dengan wilayah penugasan adalah bumi dan segala isinya.<sup>43</sup>

Nabi Daud As. juga diungkapkan Allah SWT, sebagai seorang khilafah diatas permukaan bumi ini yang harus menegakkan hukum-hukum Allah dan mewujudkan kemaslahatan alam semesta, Allah SWT berfirman dalam surat al-Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدٰوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (Q.S. Al-Shaad:26).

Pengangkatan Nabi Daud As sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu pada tangan Nabi Daud As Allah memberikan kenabian dan kerajaan besar. Pemerintahannya merupakan pemerintahan yang kuat dan besar.

---

<sup>43</sup> Quraish Shihab, *tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jilid 1, h. 140.

Kesuksesan ini diperolehnya karena beliau memerintah secara bijaksana, memiliki ilmu sampai pada tingkatan hikmah (filosof), memiliki tujuan-tujuan yang maha sempurna, dan bertindak tegas dalam penindakan hukum dan pemerintahan pada masyarakat.<sup>44</sup>

Di dalam konsep (manhaj) Islam, seorang pemimpin memiliki kedudukan yang vital dan fundamental. Dalam kehidupan berjamaah, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola (minhaj) dan gerakan seluruh anggotanya.<sup>45</sup>

Dalam bangunan masyarakat Islami, pemimpin berada pada posisi yang menentukan arah perjalanan umatnya. Apabila seorang pemimpin memiliki jiwa prima, produktif, cakap dalam pengembangan, pembangkitan daya juang dan kreatifitas amaliyah, maka dapat dipastikan, perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jamaah dipimpin oleh orang yang memiliki kelemahan baik dalam keilmuan, manajerial, tanggung jawab serta lebih mengutamakan hawa nafsu, maka dapat dipastikan bangunan jamaah akan mengalami kemunduran bahkan kehancuran.

Namun dalam memilih seorang pemimpin tidak akan lepas dari campur tangan umat atau rakyat, dimana umat sangat memiliki peran penting dalam pemilihan tersebut. Suara rakyat ini sangat diperebutkan oleh calon pemimpin karena dengan suara itulah nasib calon pemimpin

---

<sup>44</sup> Said Kutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruk, 68), Juz 5, h. 3017.

<sup>45</sup> Abdul Halim, Mahmud Ali, *Telaah Manhaj, Akidah dan Karakah*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 55.



dapat ditentukan. Untuk itu calon pemimpin akan mengerahkan kemampuan yang dimilikinya untuk mendapatkan suara tersebut. Yang paling ditakuti oleh calon pemimpin adalah sikap apatis masyarakat terhadap Pemilu yang diselenggarakan karena kebanyakan dari mereka yang apatis akan memilih untuk diam atau dalam istilah politik disebut dengan Golput.

Partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Partisipasi politik juga diartikan sebagai keterlibatan individu maupun organisasi politik dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum diinstitusi politik formal maupun informal, ditingkat nasional maupun daerah beserta seluruh aktifitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>46</sup>

Golongan putih (Golput) adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya. Golongan Putih dalam konsep *Fiqh Siyasah* tidak terlepas dari beberapa hak di dalam sistem Politik Islam. Terutama hak Pemilu dalam pemerintahan yang menganut sistem Demokrasi. Pada dasarnya hal yang menyebabkan munculnya Golput adalah kesalahpahaman masyarakat terhadap sistem Demokrasi Islam, seperti yang terjadi pada kelompok Hizbut Tahrir yang menolak sistem

---

<sup>46</sup> Inu Kencana Syafeie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.242.

Demokrasi yang berlaku dalam kancah dunia Politik saat ini.<sup>47</sup> Tetapi kelompok Hizbut Tahrir tidak dikatakan Golput, karena mereka tetap memperdulikan hak-hak perjuangan Politik Islam, karena dari sudut etimologi, Golput adalah sikap yang tidak peduli terhadap Pemilu, sedangkan dari sudut pengertian politik adalah golongan yang tidak menggunakan hak-haknya dalam sistem politik terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

Penelitian fiqh al-Siyasah terhadap Golput tidak terlepas dari kaitan hak-hak dalam politik Islam seperti yang telah disebutkan di atas hanya saja di sini menjelaskan konsep dan tujuan terhadap hukum-hukum tersebut.

#### 1. Pertama hubungan Pemilu dengan Golput dalam konsep fiqh siyasah.

Adapun pengertian Pemilu memilih seorang pejabat dengan jalan menuliskan nama atau memilih nama yang telah dicantumkan dalam kertas suara. Meskipun istilah ini telah merealisasikan makna memilih tetapi tidak digunakan dalam syari'at untuk pembahasan pemilihan umum seorang penguasa. Pada hakikatnya Pemilu mirip dengan istilah syar'i yaitu Syura. Untuk kesimpulannya penerapan hukum Islam di dalam sistem Pemilu menjadi suatu kewajiban untuk mendirikan sebuah negara yang menegakkan *daulat islamiyah*.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Taqiyuddin an Nabban, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategis Dakwa*, Cet III, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2009), h. 13.

<sup>48</sup> Taqiyuddin an-Nabban, at-Taklil al-Hizbi, edisi Indonesia: terjemahan oleh, M. Shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam*, cet II, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002), h.45.

2. Kedua tinjauan Fiqh Siyasah terhadap golongan putih hubungannya dengan partai-partai politik. Sebelum dibahas lebih panjang, terlebih dahulu mengenal pengertian partai Politik menurut pandangan Islam, Parpol dalam pandangan Islam adalah sebuah organisasi yang mempunyai empat konsep utama, yaitu:

- a. Pemikiran (*fikrah*) yang menentukan tujuan serta yang menjadi asas untuk menyatukan masyarakat dengan partai.
- b. Metode (*thariqah*) yang ditempuh partai untuk meraih tujuan.
- c. Anggota-anggota partai serta sejauh mana keyakinan mereka terhadap pemikiran (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) partai.
- d. Cara (*kafiyah*) untuk menyatukan masyarakat dengan partai tersebut.<sup>49</sup>

3. Ketiga, tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap hubungan golongan putih dengan sistem demokrasi. Jika dilihat dari demokrasi, sebagian ulama kontemporer dan intelektual Muslim mengatakan konsep demokrasi mempunyai persamaan dengan sistem syura dalam islam, sistem demokrasi ini merupakan sistem pemerintah mayoritas yang menerapkan metode permusyawaratan dalam mengambil keputusan.<sup>50</sup>

Prinsip demokrasi terhadap penerapan administrasi Negara di dalam tinjauan *Fiqh Siyasah* adalah:

- a. Prinsip kesadaran kemajemukan.

---

<sup>49</sup> Muhammad Hawari, *Politik Partai Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam*, cet II, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), h. 3.

<sup>50</sup> Artani Hasbi, *Musyawah & Demokrasi*, cet I, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2001), h. 1.

- b. Prinsip musyawarah.
- c. Cara harus sejalan dengan tujuan, prinsip ini mengemukakan dasar bahwasatu tujuan yang baik harus dengan cara yang baik.
- d. Prinsip mufakat yang jujur.
- e. Prinsip pemenuhan kehidupan ekonomi dan perancangan social budaya.
- f. Prinsip kebebasan nurani (*freedom of conscience*).<sup>51</sup>

Dengan penjelasan tiga konsep diatas, yaitu konsep fiqh al-siyasah terhadap hubungan Golput dan Pemilu, Parpol dan sistem demokrasi, tidak bisa dipisahkan demi tercapainya tujuan *hifz al-ummah* sebagai *maqasid al-shariah* untuk menegakkan Negara. Maka apa yang terkait di dalam sistem pemerintahan di Indonesia seperti sistem pemilihan umum, demokrasi adalah alat untuk mendirikan sebuah Negara yang bersyariatkan islam.

Namun ketika Golput dipandang dengan *fiqh al-siyasah* kurang fokus padah permasalahan. Untuk itu bidang *fiqh al-siyasah dusturiah* merupakan bidang yang pas untuk mengupas permasalahan Golput di surabaya. Seperti yang telah disebutkan bahwa *dusturiyah* adalah *al-siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Dengan kata lain

---

<sup>51</sup> Sukran Kamil, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002), h. 31.

yakni yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa *dusturiyah* mengatur hubungan warga negara dengan lembaga. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) membahas tentang iman, rakyat, hak dan kewajibannya, permasalahan *Ba'at*, *Waliy al-Ahdi*, perwakilan dan persoalan *Ahl Hal Wa al-Aqd*.<sup>52</sup>

Kemudian dari kaidah *Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*, Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fiqih Politik : Pergaulatan Pemilikan Politik Kebangsaan Ulama menjelaskan bahwa agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah semata. Sebab itu, demi menjaga ajaran agama di sebuah tanah air atau negara serta agar terhindar dari kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar, agama (*hirasatud din wa siyasatud dunya*). Islam mengakui dan menyaratkan adanya kepemimpinan agar pelaksanaan ajaran Islam bisa ditegakkan dalam keadaan aman.

Dalam kaidah fiqh yang lain, manusia tidak berhenti pada level memilih semata, tetapi juga harus memikirkan kemaslahatan yang lebih luas ketika dihadapkan pada dua pilihan sulit, terutama bagi yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h.33.

memegang prinsip golput. Kaidah yang bisa menjadi pijakan ialah (menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan dari pada meraih kebaikan).<sup>53</sup>

Keburukan untuk tidak memilih pemimpin ialah dapat membuka pintu bagi orang-orang yang tidak baik untuk menjadi pemimpin. Jika menurut kelompok golput dua pilihannya tidak baik menurut idealismenya, agama memberikan panduan untuk memilih yang kejelekannya sedikit. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak bisa dicapai atau dilakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya). Kalau menghendaki pemimpin yang sempurna, maka selamanya sebuah negara tidak akan memiliki pemimpin. Namun, memilih pemimpin bukan sekedar memilih yang terbaik, tapi setidaknya mencegah orang buruk untuk memimpin.

## **2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golongan Putih**

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh ahli hukum Islam terutama oleh Mufti, tentang suatu masalah atau bisa juga diartikan sebagai pendapat atau keputusan dari alim ulama atau hukum Islam.

Menjelang pemilihan umum muncul berbagai permasalahan yang dinilai sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi Indonesia.

---

<sup>53</sup> Fathoni Ahmad, "Larangan Golput : Perspektif Kaidah Fiqih", (On-Line), Tersedia di: <https://www.nu.or.id/post/read/104386/larangan-golput-perspektif-kaidah-fiqh>, akses tanggal 20 mei 2019.

Permasalahan tersebut diantaranya adanya Fatwa MUI yang melarang dan mengharamkan golput pada tahun 2009. Pada dasarnya golput bukanlah fenomena baru dalam dunia politik di Indonesia. Namun, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pada pemilu melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III pada tahun 2009 di Padang Panjang, telah mengundang respon ketidaksetujuan dan penolakan dari berbagai pihak, bahkan dari sejumlah ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<sup>54</sup>

Pada tanggal 26 Januari 2009 M/29 Muharram 1430 H, Komisi tersebut berhasil menetapkan Fatwa mengenai golput pada Pemilu, dengan dasar pertimbangan bahwa :

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih Pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih Pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*shiddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

---

<sup>54</sup> Yusuf Choirul Fuad, H. M. Atho Mudzhar, dkk. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam *Persepektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h.425.

5. Memilih Pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.<sup>55</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI akhirnya mengeluarkan rekomendasi yaitu:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.
2. Pemerintah menyelenggarakan pemilu perlu meningkatkan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.<sup>56</sup>

Fatwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah langkah besar dan pergeseran paradigma MUI di era reformasi ini. Sebelumnya di awal era reformasi MUI telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran tajam dengan kecenderungan memasuki ranah politik.

Menurut Wiwik R. Farkhurrehman, Fatwa MUI tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Berawal dari *dehem* nya K.H. Abdurrahman Wahid tentang seruan (kepada khalayak) agar tidak memilih pada pemilu 2009. Suara Gus Dur dianggap mewakili sekian kekecewaan masyarakat yang tengah mendapati gambaran politik negeri yang tidak kunjung beranjak dari kondisi prihatin. Terlebih melihat fenomena para caleg yang ditenggarai cenderung nyalon untuk cari kerja, simpati, dan kejar proyek semata,

---

<sup>55</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 878.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 878.



tanpa mengedepankan komitmen memperjuangkan agenda-agenda berdimensi kerakyatan.

2. Dalam perspektif agama sikap golput itu dipandang sebagai pengingkaran terhadap *nashbul imamah* (menegakkan kepemimpinan). Dengan tidak memilih, maka hilanglah pahala fardhu kifayah (kewajiban kolektif) itu. Dengan dasar inilah, MUI bermaksud meminimalisasi kalau perlu menghilangkan budaya “sungkan” untuk menentukan pemimpinnya dalam ajang pemilu.
3. Dalam kerangka yang lebih praktis, beberapa kalangan Islam bahkan memunculkan kaidah-kaidah *ushul fiqh* untuk memperkuat alasan agar menjauh dari sikap anti pilih pemimpin itu. Bahwa meski hukum asal memilih pemimpin itu adalah fardhu kifayah, namun kerugian (*mafsadah*) akibat sikap apatis dan golput ini akan lebih cenderung berbahaya. *Daf'u al-mafsadah al-kubra wajalbul mashlahah al-kubra* atau sebuah pertimbangan mencegah dampak negatif yang lebih besar dan menggapai kemaslahatan yang lebih besar.<sup>57</sup>

Dalam menetapkan fatwa MUI berpegang pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan dalil-dalil lainnya seperti *istihsan*, *masalah-masalah* dan pendapat ulama. Dalam menetapkan fatwa mengenai haramnya golput, MUI memiliki dasar *istinbat* hukum yang digali dari al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Berikut adalah petikan dasar-dasar istibat hukum yang dipakai, yaitu:

---

<sup>57</sup> Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 428.

1. Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-nisa: 59).

2. Pernyataan Abu Bakar RA, ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khilafah: “Wahai sekali manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku, dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku. Taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat kepada Allah, dan jika memerintahkan kemaksiatan maka jangan tanya aku”.

3. Pernyataan Umar RA ketika dikukuhkan sebagai Khilafah, berpidato: “Barang siapa diantara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan, maka luruskanlah aku”.

4. Hadist Nabi SAW : “Dari abdullah bin amr bin ‘auf al-muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR At-Tirmidzi).

5. Hadits Nabi SAW : “Barang siapa mati dan belum melakukan baiat, maka matinya dalam keadaan jahiliyah”. (HR Bukhari).

6. Pendapat Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* hal 3: “Kepemimpinan (*al-imamah*) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma”.

7. Pendapat Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* hal 4: Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu. Dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan yang memiliki otoritas memilih (ahlul ikhtiyar) hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan (calon) pemimpin (ahlul imamah) hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin.

8. Pendapat Ibnu Tamiyah dalam *As-Siyasah As-Syar'iyah*: Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena diantara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin.

9. Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilih umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menghasilkan kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syariah*).

10. UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.<sup>58</sup>

Pengambilan dasar Istinbat hukum diatas mengisyaratkan agar setiap Muslim mewujudkan berbagai sistem yang dapat menangani berbagai urusan mereka, salah satunya adalah melalui pemilu yang dilaksanakan untuk memilih para pemimpin yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddik*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam

---

<sup>58</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Op.Cit., h. 881.

hukumnya adalah wajib. Sebaliknya haram golput apabila ada pemimpin yang memenuhi syarat-syarat tersebut.

Keikutsertaan umat Islam dan seluruh masyarakat dalam pemilu bukan sekedar persoalan hak dan kewajiban, melainkan mempunyai konsekuensi hukum syari'at sesuai dengan tuntutan keadaan yang dalam istilah ushul fiqh yang sesuai dengan *illat* hukum yang mengirimnya yaitu kewajiban menegakkan *imamah* dan *imarah*.<sup>59</sup>

Oleh karena itu, dalam rekomendasi fatwa MUI menyuruh untuk memilih pemimpin sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam pemilu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk kemaslahatan bersama. Sebaliknya, jika memilih golput merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena sikap tersebut yang dapat merusak kedaulatan dan dilarang dalam syariat Islam.

---

<sup>59</sup> Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Op. Cit*, h. 431.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM KELURAHAN SRENGSEM

#### A. Sejarah Singkat Kelurahan Srengsem

Pada bagian pendahuluan telah diuraikan bahwa lokasi penelitian adalah Kelurahan Srengsem. Lokasi penelitian diambil pada wilayah ini. Berikut gambaran mengenai Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.<sup>60</sup>

Setelah Republik Indonesia merdeka sekitar tahun 1947 yang silam, kampung Srengsem merupakan bagian dari wilayah Telok Betoeng yang saat itu dikepalai oleh seorang kepala negeri yaitu Hi. Mutholib pemerintahannya berkedudukan di Telok Betoeng.<sup>61</sup>

Untuk memudahkan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan Kampung Srengsem saat itu, dengan pusat pemerintah desa saat itu, berkedudukan di desa Kota Karang karena Kampung Srengsem merupakan bagian dari wilayah desa Kota Karang Telok Betoeng.

Pada tahun 1980, desa Kota Karang masuk dalam wilayah Lampung Selatan, dengan pusat pemerintahan tetap di desa Kota Karang. Berhubung Kampung Srengsem dengan desa Kota Karang jarak tempuhnya cukup jauh apalagi saat itu dengan berjalan kaki, maka untuk mengurus segala sesuatu dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan maka pada tahun 1982 Kampung Srengsem memisahkan diri dengan desa Kota Karang, dengan membentuk

---

<sup>60</sup> Profil Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

pemerintahan desa tersendiri dibawah pemerintahan tingkat II Lampung Selatan.

Setelah tahun 1987 pemerintahan desa Srengsem merupakan bagian dari Kecamatan Panjang dan memisahkan pemerintahan dari kabupaten Lampung Selatan ke tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung. Pada tahun 1992 setelah desa Srengsem berubah statusnya menjadi Kelurahan Srengsem.<sup>62</sup>

Tabel 1  
Daftar Nama Lurah Srengsem

No	Nama	Tahun
1.	Aminuddin	1980-1982
2.	A. Latif. TA	1982-1987
3.	H. Sukri	1987-1992
4.	Syaifulloh BA	1992-1994
5.	Haitami Ma'ruf S.E.	1994-1996
6.	H. Abdul Mu'in S.E.	1996-1999
7.	Sutomo S.Sos	1999-2001
8.	Drs. Basid	2001-2004
9.	Huzairin S.Sos	8 Bulan
10.	Syamsi Idris	2004-2008
11.	Nuryunus	2008-2012
12.	Budi Kurniawan	2012-2016
13.	Amri Iskandar	2016-Sekarang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Srengsem

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

## B. Struktur Organisasi Kelurahan Srengsem

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 01 Nopember 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kelurahan Kota Bandar Lampung terdiri atas Lurah, Jabatan Fungsional (Bhabinkamtinnas, Babinsa, PLKB), Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan.<sup>63</sup>

Tabel 2  
Struktur Organisasi  
Kelurahan Srengsem

No.	Nama	Jabatan
1.	Amri Iskandar	Lurah
2.	Abizar Algifari, S.E.,M.M.	Sekretaris
3.	Yulida	Staff Sekretaris
4.	Hermawan Tri Handono	Kasi Trantib
5.	Moh. Ismangil	Bhabinkamtinnas
6.	Aryanto	Babinsa
7.	M. Ichwan, Am.d.	Plkb

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Srengsem

## C. Tugas dan Fungsi kelurahan Srengsem

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

### a. Tugas Pokok

Kelurahan Srengsem mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan

---

<sup>63</sup> Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kelurahan



pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kelurahan.

b. Fungsi Pokok

Kelurahan srengsem dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pelayanan Masyarakat
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum
5. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.<sup>64</sup>

**D. Keadaan Demografi Kelurahan Srengsem**

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama tentang jumlah, struktur, dan perkembangannya.

1. Kependudukan

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Kelurahan Srengsem adalah 7.043 jiwa yang terdiri dari;

- i. Penduduk Laki-laki sebanyak 2.782 jiwa
- ii. Penduduk Perempuan sebanyak 4.261 jiwa

Dengan jumlah sebaran KK (kartu keluarga) 1.593 KK, yang tersebar di 2 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tetangga (RT).

---

<sup>64</sup> Tugas dan Fungsi Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

## 2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kelurahan Srengsem, dengan tingkat pendidikan yang beragam. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di kelurahan Srengsem.

Tabel 3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Srengsem

No.	Tamatan	Jumlah
1.	SD	2.678
2.	SMP	1.657
3.	SMA	1.616
4.	Diploma/Sederajat	57
5.	Sarjana	41

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Srengsem

## 3. Pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencarian pokok yang banyak dilakukan warga masyarakat Kelurahan Srengsem adalah:

Tabel 4  
Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Srengsem

No.	Pekerjaan	Jiwa
1.	Buruh / Swasta	3.122
2.	Pegawai Negeri	43
3.	Pengrajin	69
4.	Pedagang	1.673
5.	Penjahit	35
6.	Tukang Batu	78

7.	Tukang Kayu	37
8.	Peternak	19
9.	Nelayan	67
10.	Montir	17
11.	Sopir	56
12.	Tni / Polri	7
13.	Pengusaha	38
14.	Jasa Transportasi	20
15.	Dokter	-

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Srengsem

#### 4. Agama

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Tabel 5  
Agama yang dianut masyarakat  
Kelurahan Srengsem

No	Agama	Jiwa
1.	Islam	6.751
2.	Kristen	217
3.	Khatolik	57
4.	Hindu	11
5.	Budha	7

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Srengsem

## 5. Etnis

Etnis adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.

Tabel 6  
Etnis Masyarakat  
Kelurahan Srengsem

No	Suku	Kk
1.	Lampung	398
2.	Jawa	744
3.	Padang	129
4.	Batak	96
5.	Palembang	214
6.	Cina	7
7.	Arab	5

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Srengsem

### E. Letak Geografis Kelurahan Srengsem

Srengsem adalah sebuah kelurahan di kecamatan panjang, kota Bandar Lampung. Wilayah Kelurahan Srengsem yang luasnya meliputi 556,5 Ha. Merupakan wilayah pesisir panati teluk lampung yang berbukit, berbatasan dengan lampung selatan.

Perbukitan Kelurahan Srengsem oleh pihak kehutanan lebih dikenal dengan jalur hijau dengan istilah Register 17, karena ternyata diatas perbukitan jalur hijau, mengalir sungai yang cukup jernih dan bening, satu-satunya sungai tempat warga masyarakat Kelurahan Srengsem untuk mengambil air keperluan rumah tangga, minum dan masak selain tempat

mandi dan mencuci, pada saat itu. Lingkungan Kelurahan Srengsem terdapat berbagai etnis suku yang berbeda-beda seperti Lampung, Jawa, Padang, Batak, Palembang, Cina, Arab. Dan mata pencarian penduduk pun berbeda-beda diantaranya Buruh/swasta, Pegawai Negeri, Pedagang, Peternak, Nelayan, Sopir dan masih banyak lagi.

Batas wilayah digunakan untuk mengatur dan menandai luas cakupan suatu wilayah daerah tersebut atau pemisah antara daerah satu dengan yang lain. Adapun batas-batas wilayah kelurahan Srengsem sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Karang Maritim.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Katibung, Lampung Selatan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Katibung, Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Lampung.

Dari batas wilayah tersebut menunjukkan bahwa kelurahan Srengsem berbatasan langsung dengan kelurahan Karang Maritim, Katibung, dan Teluk Lampung.

Sedangkan untuk luas batas wilayah kegunaan yang ada di Kelurahan Srengsem, kecamatan panjang, kota bandar lampung adalah **556,5** Ha yang Pemanfaatannya berupa:

Tabel 7  
Luas Wilayah Menurut Kegunaannya  
Kelurahan Srengsem

No.	Wilayah	Ukuran
1.	Luas Pemukiman	250,5 ha / m2
2.	Luas Perkebunan	100 ha / m2
3.	Luas Kuburan	42 ha / m2

4.	Perkantoran	102 ha / m2
5.	Luas Prasarana Umum Lainnya	62 ha / m2
	Total Luas	556,5 ha / m2

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Srengsem

Melihat komposisi pemanfaatan lahan, yang paling besar adalah untuk lahan pemukiman dan lahan perkantoran, hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Srengsem memiliki potensi dan sosial budaya, ekonomi yang cukup besar. Luas perkebunan yang masih ada juga masih potensial baik untuk pengembangan perekonomian sektor perkebunan maupun industri. Kondisi ini didukung letak Kelurahan Srengsem yang cukup strategis, yaitu berada di dekat pusat pemerintahan kecamatan maupun kota.

#### **F. Perilaku Politik Golongan Putih Warga Kelurahan Srengsem Serta Apa Saja Yang Menjadi Alasan Mereka Melakukan Golput Pemilihan Gubernur Lampung 2018**

Mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Srengsem sangat erat kaitannya dengan bagaimana sosialisasi politik itu dilakukan dimana dengan sosialisasi politik yang baik mampu membangun kesadaran politik masyarakat, namun pada penjelasan diatas bahwasannya partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur di Kelurahan Srengsem masih ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara masih terlihat kurang atau tingkat kesadaran diri dari masyarakat masih kurang.

Terlebih jika di lihat dari sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh panitia pemilu terlihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu lainnya, hal ini yang menjadi alasan masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan umum. Sehingga partisipasi atau tingkat kesadaran memilih dan menggunakan hak suara mereka itu menurun di akibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki.

Kondisi di Kelurahan Srengsem pada saat pemilihan Gubernur 2018 lalu dapat dikatakan aman karena masyarakat dan tokoh masyarakat disana turut serta sangat antusias memilih dan menjaga keamanan dalam proses pemilihan berlangsung, sehingga tidak ada konflik yang terlihat antara masyarakat yang berbeda pilihan, seperti penuturan Lurah Srengsem Bapak Amri Iskandar dalam wawancara mengatakan. “Alhamdulillah pada pemilihan gubernur tahun kemarin berjalan dengan lancar karena masyarakat sangat antusias dalam pemilu karena sebelumnya sudah dilakukan penyuluhan dari pihak PPS dan Panwaslu beserta tokoh-tokoh masyarakat walaupun tidak semua menggunakan hak pilihnya”.<sup>65</sup>

Pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 jumlah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang ada di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung berjumlah 5.063. jumlah itu terdiri dari 4.870 pemilih tetap dan 193 pemilih tambahan. Dari data tersebut jumlah perolehan suara yaitu 3.369 yang terdiri dari 3.317 surat suara yang sah sementara 52

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Lurah Bapak Amri Iskandar (56 tahun), pada hari kamis 20 juni 2019.

surat suara dinyatakan tidak sah. Dari hasil data tersebut dapat diketahui jumlah orang yang tidak memilih atau melakukan Golput yaitu sebanyak kurang lebih 1.501 atau sebanyak 25,84 %.

Berikut ini penulis menyajikan tabel hasil Pemilihan Gubernur lampung pada tahun 2018 lalu yang dilaksanakan di Kelurahan Srengsem kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. Adapun jumlah TPS yang berada di Kelurahan Srengsem yaitu berjumlah 10 TPS dan terbagi di 23 RT.

**Tabel 8**  
**Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Bandar Lampung.**

NO	TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP	DAFTAR PEMILIH TAMBAH	PASANGAN CALON				JUMLAH PEROLEH AN SUARA	%
				1	2	3	4		
				M.RIDHO FICARDO / BACHTIAR	Drs.HERMAN HN.MM / Ir.SUTONO	ARINAL DJUNAIDI / Hj.CHUSNUNA M.SI.M.Kn.Ph,d	Dr.Ir.H.MUSTAFA /Hj.AHMAD JAJULI, M.SI		
1	I	403	19	28	215	48	11	303	71.19
2	II	357	23	34	143	13	29	221	65.29
3	III	572	22	48	265	21	27	366	73.40
4	IV	736	64	53	375	40	24	500	76.21
5	V	395	4	28	203	40	24	298	68.81
6	VI	522	7	36	270	31	4	345	79.17
7	VII	443	10	15	221	49	8	299	75.42
8	VIII	686	9	40	320	31	26	422	76.73
9	IX	367	29	31	228	16	17	300	78.08
10	X	389	6	11	220	53	21	315	72.13
<b>JUMLAH</b>		<b>4.870</b>	<b>193</b>	<b>324</b>	<b>2.460</b>	<b>342</b>	<b>191</b>	<b>3.369</b>	<b>74.16</b>

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Srengsem



Berikut adalah tabel data dari pemilih yang tidak memilih pada Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Tabel 9  
Daftar Nama Informan Kelurahan Srengsem

No	Nama	Umur	RT	Pekerjaan
1.	Poninten	56 Tahun	07	Petani
2.	Aulia Shinta	18 tahun	22	Mahasiswa
3.	Suwajianto	45 tahun	22	Sopir
4.	Nasiah	42 tahun	22	Ibu Rumah Tangga
5.	Ade Irawan	32 tahun	01	Nelayan
6.	Sopiah	42 tahun	01	Ibu Rumah Tangga
7.	Pebrian	20 tahun	05	Mahasiswa
8.	Heriamini	60 tahun	05	Ibu Rumah Tangga
9.	Siti Maysaroh	21 tahun	17	Mahasiswa
10.	Sukarmo	57 tahun	17	Petani
11.	Ependi	40 tahun	13	Nelayan
12.	Agus Haryanto	42 tahun	06	Sopir
13.	Kadirin	55 tahun	22	Petani
14.	Rita Nafsiyah	50 tahun	20	Petani
15.	Slamet	37 tahun	17	Buruh Bangunan
16.	Siti Khodijah	37 tahun	12	Ibu Rumah Tangga
17.	Minarti	36 tahun	20	Ibu Rumah Tangga
18.	Asnah	63 tahun	04	Pedagang
19.	Hairani	56 tahun	08	Petani
20.	Rukmanah	58 tahun	08	Petani
21.	Nasroni	64 tahun	13	Pedagang
22.	M. Surahman	40 tahun	09	Pedagang

23.	Linda Sari	19 tahun	22	Mahasiswa
24.	Siswanto	46 tahun	09	Buruh Bangunan
25.	Intan Sari	18 tahun	09	Mahasiswa
26.	Febriantika	29 tahun	06	Ibu Rumah Tangga
27.	Yandika	20 tahun	05	Mahasiswa
28.	Firmansyah	24 tahun	04	Pengangguran
29.	Hendrianto	29 tahun	22	Buruh bangunan
30.	Andi Yuliansyah	37 tahun	07	Nelayan

Sumber: Dokumentasi Wawancara di Kelurahan Srengsem

Jika di lihat dari tabel di atas jumlah informan ada 30 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan. Hasil penelitian yang penulis lakukan di 23 RT terdapat 10 TPS yang ada di kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan usia terendah 18 tahun dan tertinggi 64 tahun rata-rata usia dari informan yang berjumlah 30.

Tabel 10  
Daftar Rasio Usia Informan Kelurahan Srengsem

No.	Rasio Usia	Jumlah
1.	18-25	7
2.	26-33	3
3.	34-41	5
4.	42-49	6
5.	50-57	5
6.	58-64	4
<b>1.193</b>		<b>30</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>39.7 tahun</b>

Sumber: Dokumentasi Wawancara di Kelurahan Srengsem

Dari tabel diatas rata-rata umur dari informan yang berjumlah 30 yang penulis temukan di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ialah **39.7** Tahun.

Jenis pekerjaannya cukup beragam mulai dari petani yang berjumlah 6 orang yaitu Poniah, Sukarmo, Kadirin, Rita Nafsiyah, Hairani, dan Rukmanah. Selanjutnya ada Ade Irawan, Efendi dan Andi Yuliansyah yang bekerja sebagai Nelayan (3 orang). Lalu Slamet, Siswanto dan Hendrianto bekerja sebagai buruh bangunan (3 orang). Aulia Shinta, Pebrian, Linda Sari, Siti Maysaroh, Intan Sari dan Yandika sebagai mahasiswa (6 orang). Ada pula yang bekerja sebagai pedagang yaitu, Asnah, Nasroni dan M. Surahman (3 orang). Selanjutnya Ibu rumah tangga yang diantaranya Nasiah, Heriamini, Sopiah, Minarti, Siti Khodijah dan Febriantika (6 orang). Sementara itu Suwajianto dan Agus Haryanto sopir (2 orang). Dan Firmansyah belum bekerja (1 orang).

Tabel 11  
Daftar Pekerjaan Informan Kelurahan Srengsem

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Petani	6	20%
2.	Ibu Rumah Tangga	6	20%
3.	Sopir	2	6,7%
4.	Buruh	3	10%
5.	Nelayan	3	10%
6.	Pedagang	3	10%
7.	Mahasiswa	6	20%
8.	Belum Bekerja	1	3,3%

Sumber: Dokumentasi Wawancara di Kelurahan Srengsem

Kemudian berasal dari berbagai RT, RT 01 ada 2 orang yaitu Ade Irawan dan Sopiah, RT 04 ada 2 orang yaitu Asnah dan Firmansyah, RT 05 ada 3 orang yaitu Febrian, Heriamini dan Yandika, RT 06 ada 2 orang yaitu Agus Harianto dan Febriantika, RT 07 ada 2 orang yaitu Andi Yuliansyah dan Poninten, RT 08 ada 2 orang yaitu Hairani dan Rukmanah, RT 09 ada 3 orang yaitu Siswanto, M. Surahman dan Intan Sari, RT 12 ada 1 orang yaitu Siti Khodijah, RT 13 ada 2 orang yaitu Ependi dan Nasroni, RT 17 ada 3 orang yaitu Siti Maisaroh, Slamet dan Sukarmo, RT 20 ada 2 orang Rita nafsiyah dan Minarti, RT 22 ada 6 orang yaitu Aulia Shinta, Suwajianto, Nasiah, Kadirin, Linda Sari, dan Hendrianto.

Tabel 12  
Asal Informan Kelurahan Srengsem

No.	Asal RT	Jumlah
1.	01	2 Orang
2.	04	2 Orang
3.	05	3 Orang
4.	06	2 Orang
5.	07	2 Orang
6.	08	2 Orang
7.	09	3 Orang
8.	12	1 Orang
9.	13	2 Orang
10.	17	3 Orang
11.	20	2 Orang
12.	22	6 Orang

Sumber: Dokumentasi Wawancara di Kelurahan Srengsem

Dari hasil wawancara penulis dengan 30 orang informan mengenai alasan mereka tidak memilih dalam Pemilihan Gubernur lampung tahun 2018 dikarenakan yaitu, yang pertama dikarenakan pada saat yang bersamaan sedang puncak musim panen, sehingga menyebabkan warga yang berprofesi sebagai petani memilih golput dari pada harus pergi ke TPS sebanyak 6 orang atau 20% dari 30 orang informan.

Alasan kedua dikarenakan keempat calon Gubernur kurang mensosialisasikan visi dan misi-nya masing-masing dengan masyarakat setempat sehingga tidak terlalu mengenal dari masing-masing calon gubernur tersebut dan memutuskan untuk tidak memilih didalam pemilihan calon Gubernur Lampung Periode 2019-2024 sebanyak 9 orang atau 30% dari 30 orang informan.

Ketiga dikarenakan tidak memilih didalam pemilihan gubernur lantaran sedang bekerja diluar kota dan adapula yang sedang menempuh pendidikan sebanyak 8 orang atau 27% dari 30 orang.

Dan alasan keempat dikarenakan mau siapapun nantinya yang menjadi Gubernur lampung, tidak berpengaruh banyak didalam kehidupannya, sehingga mereka lebih memilih untuk golput pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 sebanyak 7 orang atau 23% dari 30 orang informan.

Tabel 13  
Daftar Alasan Informan Tidak Memilih

No.	Nama	Alasan
1.	Poninten	Bersamaan dengan puncak musim panen
2.	Aulia Sinta	Sedang menempuh pendidikan

3.	Narsiah	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi
4.	Ade Irawan	Karena tidak begitu berpengaruh di kehidupan
5.	Suwajianto	Sedang bekerja diluar kota
6.	Sopiah	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi
7.	Pebrian	Sedang menempuh pendidikan
8.	Heriamini	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi
9.	Siti Maysaroh	Sedang menempuh pendidikan
10.	Sukarmo	Bersamaan dengan puncak musim panen
11.	Ependi	Karena tidak begitu berpengaruh di kehidupan
12.	Agus Harianto	Sedang bekerja diluar kota
13.	Kadirin	Bersamaan dengan puncak musim panen
14.	Rita Nafsiah	Bersamaan dengan puncak musim panen
15.	Slamet	Karena tidak begitu berpengaruh di kehidupan
16.	Siti Khodijah	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi
17.	Minarti	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi
18.	Asnah	Karena tidak begitu berpengaruh di kehidupan
19.	Hairani	Bersamaan dengan puncak musim panen
20.	Rukmanah	Bersamaan dengan puncak musim panen
21.	Nasroni	Karena tidak begitu berpengaruh di kehidupan
22.	M. Surahman	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi
23.	Linda Sari	Sedang menempuh pendidikan
24.	Siswanto	Karena tidak begitu berpengaruh di kehidupan
25.	Intan Sari	Sedang menempuh pendidikan
26.	Febriantika	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi
27.	Yandika	Sedang menempuh pendidikan
28.	Firmansyah	Karena tidak begitu berpengaruh di kehidupan
29.	Hendrianto	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi
30.	Andi Yuliansyah	Karena calon Gubernur kurang bersosialisasi

Sumber: Dokumentasi Wawancara di Kelurahan Srengsem

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perilaku Politik Masyarakat Golongan Putih Kelurahan Srengsem**

Pemilihan umum dan demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya, terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adanya keterlibatan masyarakat secara aktif.

Partisipasi politik merupakan suatu mekanisme yang penting dalam suatu negara, kesadaran politik warga negara dalam hal ikut serta dalam proses pengangkatan kepala daerah merupakan faktor yang sangat mendasar. Artinya masyarakat harus mengerti pentingnya ikut partisipasi, dan masyarakat diharuskan memahami akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik.

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat pendidikan, tingkat kehidupan, tingkat ekonomi, dan tingkat fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik. Salah satu fasilitas yang

dapat memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik adalah adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yang berada di kelurahan Srengsem dalam kegiatan politik khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor bersamaan dengan puncak musim panen, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kurang dapat memaksimalkan kampanye di masyarakat, dan faktor non teknis.

Dari hasil penelitian penulis yang penulis lakukan di kelurahan srengsem, mendapatkan bahwa faktor puncak musim panen menjadi salah satu faktor penyebab adanya golongan putih, karena pada saat pemilu bertepatan pada puncak musim panen sehingga petani tidak dapat hadir untuk memberikan hak suara dalam pemilihan gubernur dikarenakan pada puncak musim panen dapat memakan waktu selama tujuh hari berturut-turut. Tuntutan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat membuat masyarakat di Kelurahan Srengsem harus senantiasa membanting tulang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena mata pencarian masyarakat Kelurahan Srengsem berbeda-beda diantaranya, petani, buruh/swasta, sopir, pedagang, nelayan dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka hanya menghabiskan hari-harinya untuk bekerja. Dan mereka cenderung mengesampingkan aktifitas sosial atau kegiatan yang bersifat tidak menghasilkan apa-apa untuk mereka serta kegiatan yang sifatnya tidak ada hasil untuk memenuhi kebutuhannya.



Faktor kedua yang penulis dapati di kelurahan srengsem mendapati bahwa kurangnya kesadaran masyarakat didalam berpartisipasi politik, dengan rasa kurang percayanya masyarakat Kelurahan Srengsem terhadap pemerintah membuat masyarakat menjadi acuh atau kurang berminat didalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur lampung. Mereka beranggapan suara mereka atau aspirasi mereka tidak dapat merubah keadaan menjadi lebih baik, mereka lebih memilih mencari kegiatan lain yang dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Padahal dengan adanya pilkada atau pemilu mereka dapat menyampaikan aspirasi untuk kehidupan yang lebih baik dan dapat menjadikan sistem pemerintahan yang adil dan makmur.

Faktor ketiga yang penulis temukan di kelurahan srengsem yaitu, keempat calon gubernur lampung kurang dapat memaksimalkan kampanye, karena dari ke 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur baik itu paslon nomer 1 yaitu M. Ridho dan Bahtiar, paslon nomer 2 yaitu Herman HN dan Sutono, paslon Nomer 3 yaitu Arinal dan Nunik, paslon Nomor 4 yaitu Mustafa dan Ahmad Jajuli sama-sama menjabat sebagai Gubernur, Walikota, Bupati serta Anggota Dewan. Maka sebelum ditetapkan masa kampanye terbuka, mereka yang memiliki jabatan publik harus mengajukan cuti, seperti yang telah diatur didalam Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, kemudian peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 tahun 2017 tentang Pilkada. Masa kampanye diberlakukan mulai tanggal 15 Februari sampai 23 Juni 2018 atau lebih tepatnya 129 hari masa kampanye terbuka sebelum diberlakukannya masa tenang yaitu seminggu

sebelum pencoblosan. Dari waktu yang telah ditentukan tersebut yaitu 129 hari masa kampanye terbuka untuk memaparkan visi dan misi para paslon gubernur lampung, dirasa kurang mampu untuk menjangkau semua wilayah yang berada di provinsi lampung, yang salah satunya adalah Kelurahan Srengsem. Karena dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Srengsem, banyak warga yang mengungkapkan bahwa mereka kurang begitu mengenal ataupun kurang mengetahui apa saja visi dan misi dari para paslon sehingga mereka memilih golput.

Faktor keempat yang penulis dapati di Kelurahan Srengsem, yaitu terdapat faktor non teknis atau lebih tepatnya berhalangan, dikarenakan sakit, kerja di luar kota tetapi tidak dapat cuti atau sedang mengambil lembur kerja, waktu libur yang singkat sehingga orang yang sedang menempuh pendidikan diluar kota, lebih memilih tidak menyuarakan hak pilihnya dikarenakan waktu libur yang hanya satu hari tidak memungkinkan untuk pulang kekampung halaman hanya untuk menyuarakan hak pilihnya.

#### **B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Golongan Putih Kelurahan Srengsem**

Golput pada dasarnya tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah atau presiden, sehingga hak suara yang seharusnya tersalurkan menjadi terbuang sia-sia. Hal itu, bukan saja akan merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa merugikan orang lain.

Oleh karenanya sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk membangun daerahnya dimulai dari memilih pemimpin lima tahun

mendatang. Dengan berpartisipasi dalam pilkada menunjukkan umat yang peduli dan bertanggung jawab hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral sebagai umat dalam rangka ikut menata wilayah.

Secara umum manusia diberi rasa tanggung jawab mengelola dunia sesuai kapasitasnya termasuk memilih, itu salah satu yang harus dilakukan supaya didalam Pemilihan Gubernur Lampung nanti menambah peluang terpilihnya orang baik untuk memimpin lampung periode 2019-2024.

Didalam Al-quran manusia dilarang membuat kerusakan dimuka bumi salah satunya untuk mencegah kerusakan tersebut ialah dengan tidak bersifat apatis, dalam konsepsi Islam golput identik dengan orang yang tidak bertanggung jawab.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa memilih pemimpin atau ikut serta dalam Pemilihan Gubernur adalah suatu keharusan atau suatu kewajiban. Serupa dengan fatwa MUI bahwa tindakan golput atau tidak ikut serta dalam pemilihan gubernur itu haram. Selain itu, dalam rekomendasi fatwa MUI menyuruh untuk memilih pemimpin sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam pemilu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk kemaslahatan bersama. Sebaliknya, jika memilih golput merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena sikap tersebut yang dapat merusak kedaulatan dan dilarang dalam syariat Islam.

Dari beberapa uraian yang telah disinggung yang menjadi faktor atau alasan banyak masyarakat melakukan tindakan golput ialah karena mereka merasa kecewa terhadap kepemimpinan atau calon-calon pemimpin karena

meraka merasa putus asa dengan keadaan yang tidak berubah. Namun hal tersebut tentu bukan merupakan jawaban atas masalah yang selama ini terjadi. Memilih seorang pemimpin adalah wajib hukumnya bagi umat muslim terlepas baik atau tidaknya dia saat menjadi pemimpin, tugas kita sebagai masyarakat hanyalah memilih pemimpin yang sebaik-baiknya dan jika dia lalai tentulah dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Dalam surat An-Nisa ayat (59) Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS. An-Nisa: 59).

Ayat diatas menjelaskan hukum wajibnya menaati *ulil amri* dalam hal ini mayoritas para ulama menafsirkannya sebagai pemerintah. Jadi, menaati pemimpin atau ulil amri adalah wajib, karena jika pemimpin tidak ada kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib.

Selain itu yang menjadi faktor golput dalam Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 di Kelurahan Srengsem ialah dikarenakan seseorang tersebut sedang berada diluar kota sehingga tidak bisa menggunakan hak

pilihnya. Menurut penulis jika demikian maka hal tersebut masih dapat di toleransi karena beliau tidak memilih bukan atas dasar kehendaknya melainkan karena situasi dan kondisi nya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

Di dalam firman Allah Swt Surat Al-Anfal ayat (25) dijelaskan:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya.”

Dari ayat tersebut, apabila kita mencoba menarik pada kegiatan Pemilihan Gubernur, maka akan dapat dipahami bahwa orang yang berdiam diri, tidak ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada, ketika yang terpilih ternyata pemimpin yang tidak bertanggung jawab maka bukan tidak mungkin, akibat yang dirasakan bukan hanya oleh orang yang tidak mendukung pemilu atau pilkada, tetapi juga pada semua bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, orang-orang mukmin tidak akan pernah sengambil sikap golput ketika pilkada, karena mengetahui bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban, bukan sekedar hak. Sebagai kewajiban maka orang-orang mukmin pasti akan memilih pemimpin yang terrbaik dari calon-calon yang ada demi kemajuan dan kemaslahatan bersama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari data yang penulis dapati di kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, faktor kesadaran masyarakat masih cenderung rendah didalam mengikuti pemilihan Gubernur Lampung periode 2019-2024. Dari 30 informan yang penulis wawancarai terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memilih dalam Pemilihan Gubernur. Adapun faktor-faktornya yaitu puncak musim panen sebanyak 6 orang atau 20%, faktor kurangnya kesadaran masyarakat sebanyak 8 orang atau 27%, faktor paslon Gubernur kurang dapat memaksimalkan kampanye sehingga masyarakat tidak mengenal atau tidak mengetahui visi-misi dari pasangan calon Gubernur sebanyak 9 orang atau 30%, dan faktor non-teknis diantaranya sedang menempuh pendidikan di luar kota atau sedang sakit sebanyak 7 orang atau 23%. Dari 4 faktor diatas, faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat kelurahan Srengsem tidak mengikuti pemilu adalah faktor kurang dapat memaksimalkannya kampanye sebesar 30%.
2. Menurut analisis Hukum Islam memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Dalam menyikapi perilaku politik masyarakat golongan putih di kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung

menurut hukum Islam sudah seharusnya masyarakat tersebut melaksanakan kewajibannya untuk memilih pemimpin mereka dalam hal ini tentu saja calon Gubernur Lampung yang nantinya akan menjadi pemimpin mereka. Seperti yang telah Allah SWT sebutkan didalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yaitu Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, hal ini demi terciptanya kemaslahatan sesama umat juga semua masyarakat Lampung. Sebaliknya, jika memilih golput merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena jika tidak memilih akan berdosa. Dan juga sikap tersebut yang dapat merusak kedaulatan dan dilarang dalam syariat Islam.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat di Kelurahan Srengsem, apabila tidak dalam keadaan yang mendesak atau tidak memungkinkan diharapkan dalam pemilihan apapun itu baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah agar dapat berpartisipasi dan ikut memilih menggunakan hak suaranya sesuai dengan hati nurani nya masing-masing. Supaya terpilih pemimpin yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat.
2. Untuk para pasangan calon kepala daerah harus bisa memanfaatkan waktu kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk mensosialisasikan visi misi nya masing-masing karena masih banyak

masyarakat khususnya di Kelurahan Srengsem yang kurang mengetahui visi misi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah sehingga lebih memilih untuk golput.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Mahmud Ali, *Telaah Manhaj, Akidah dan Karakah, terj. As'ad*  
Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung :  
University Lampung, 2008).
- Anto Mudzar dan Hairul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta :  
Puslitbag Leture dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag dan  
Kementerian Agama, 2012.
- Anwar Arifin, *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik Edisi 2*, Yogyakarta: Graha  
Ilmu, 2014.
- Artani Hasbi, *Musyawah & Demokrasi*, cet I, Jakarta: Gaya Media Pratam,  
2001.
- Badri Khaeruman dkk., *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*,  
Jakarta: PT Nimas Multima, 2004.
- Badri Khaeruman, *Islam dan Demokrasi Mengungkapkan Fenomena Golput*.  
Jakarta : PT Nimas Multima, 2004
- Badri Khaeruman dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkapkan Penomena Golput*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy  
Syifa', 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi  
Keempat Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Efriza, *Political Explore*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 6, Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004.
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*,  
Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
2003.

Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014

Jolo J Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Lucia Ratih, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, Juli 2010

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*. Jakarta : PT Gramedia, 1980.

Muhamad Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Muhammad Hawari, *Politik Partai Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam*, cet II, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Parded Bonet “*Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*”, (On-line),

Tersedia di: [https://www.academia.edu/12478365/PENYEBAB\\_MASYARAKAT\\_TIDAK\\_MEMILIH\\_DALAM\\_PEMILU](https://www.academia.edu/12478365/PENYEBAB_MASYARAKAT_TIDAK_MEMILIH_DALAM_PEMILU)

AKAT TIDAK MEMILIH DALAM PEMILU, akses tanggal 1 Mei 2019.

Penjelasan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Penjelasan Pasal 308 Undang-Undang Tentang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

Priambudi Sulistiyanto, *Politik Golput di Indonesia Kasus Peristiwa Yogya*.

Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Quraish Shihab, *tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Said Kutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Syuruk.

Samuel P Huntington Dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sukran Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002.

Surharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "suatu pendekatan praktik"*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, 2015.

Taqiyuddin an Nabban, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategis Dakwa*, Cet III, Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2009.

Taqiyuddin an-Nabban, at-Taklil al-Hizbi, edisi Indonesia: terjemahan oleh, M. Shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam*, cet II, Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002.

Varma S.P. *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Zeni Yusardi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.